IMPLIKASI KEBIJAKAN PRESIDEN ERDOGAN TERHADAP KELOMPOKGULENISME PASCA KUDETAMILITER TURKI TAHUN 2016

Ditulis oleh : Junita Siregar (NIM. 20130510398)

DR. Sidik Jatmika, M.Si. (NIK / NIP. 163 021)

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

INTISARI

Semangat demokratisasi yang ada di Turki, di satu sisi merupakan peluang bagi Turki untuk meningkatkan citra dan pengaruhnya di kawasan. Menurut Altunışık (2005), ada tiga elemen penting dalam pengalaman Turki, yakni sekularisme, demokrasi dan pengaruh internasional. Ketiga elemen ini saling terkait dalam mempengaruhi pembentukan dan pengembangan pengalaman demokratisasi Turki dan identitas negara Turki sebagai salah satu negara demokratis di Timur Tengah. Awal sejarah Turki ditandai dengan adanya sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Proses sekularisme yang dilakukan oleh Atatürk pada masa itu memang mengundang kontroversi dari masyarakat yang sudah berada dalam kekuasaan Kesultanan Turki Usmaniyah yang terbiasa dengan hukum Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, sekularisme mulai menghadapi kritik dan tantangan seiring terjadinya proses demokratisasi di Turki pada pertengahan tahun 1950-an. Pada kurun 1960-1970, perpolitikan Turki mulai diramaikan oleh partisipasi dari gerakan-gerakan sosial masyarakat yang digerakkan oleh basis massa Islam konservatif. Ditengah-tengah upaya perebutan pengaruh Islam di Turki yang menganut paham Sekuler, muncullah seorang presiden yang memiliki spirit keislaman, yaitu presiden Erdogan. Namun, keberhasilan Erdogan dalam membangun Turki memberikan dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan nasional di internal Turki.Salah satu dampak positifnya adalah kini Turki telah bebas menggunakan simbol-simbol Islam sebagai identitas Turki, dan Erdogan hadir sebagai penakluk sekularimse Turki.Sedangkan dampak negatifnya adalah banyak pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Erdogan, sampai mengakibatkan terjadinya kudeta militer Turki pada Juli tahun 2016.

Kata Kunci : Turki, Sekularisme, Demokratis, Timur Tengah, Erdogan, Kudeta Militer.

PENDAHULUAN

Recep Tayyep Erdogan adalah presiden Turki ke-12.Sejak Erdogan memimpin Turki, telah terjadi perubahan aliran politik yang dominan drastic.Keberhasilan Erdogan dalam memimpin Turki memberikan kemajuan dalam berbagai bidang. Perjuangan Erdogan beserta

partai yang dibawanya yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan memberikan perubahan atas keterpurukan Turki selama ini serta menjunjung tinggi perdamaian, antara lain dengan membangun perekonomian dan menegakkan demokrasinya.Semangat demokratisasi yang ada di Turki, di satu sisi merupakan peluang bagi Turki untuk meningkatkan citra dan pengaruhnya di kawasan. Banyak pihak menilai Turki mampu menjadi inspirasi bagi pembangunan demokrasi di Timur Tengah. Tokoh Ennahda dari Tunisia, Rachid Ghannouchi menyatakan bahwa mereka belajar dari Turki memadukan Islam dengan modernitas. Turki dipandang sebagai contoh nyata bagi dunia Arab dalam mewujudkan HAM, kebebasan demokrasi dan kemajuan ekonomi.[1]

Pada kurun 1960-1970, perpolitikan Turki mulai diramaikan oleh partisipasi dari gerakan-gerakan sosial masyarakat yang digerakkan oleh basis massa Islam konservatif. Gerakan sosial masyarakat tersebut diantaranya adalah gerakan Hizmet yang dimunculkan oleh Muhammad Fethullah Gülen, gerakan Nurcu yang dimunculkan oleh Bediuzzaman Nursi, dan gerakan Milli Görüs yang dimunculkan oleh Necmettin Erbakan. Milli Görüs menjadi sebuah gerakan yang memiliki momentum yang besar dan memiliki intensi untuk terlibat dalam perpolitikan Turki untuk mempromosikan agenda-agenda dari kalangan Islam konservatif, diantaranya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan moralitas dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan kaum miskin di daerah pedalaman Turki.Gerakan Milli Görüs melihat bahwa adanya sekularisme yang diterapkan Turki bukannya menghasilkan kemajuan bagi negara Turki, namun kemunduran, sehingga sistem sekularisme yang telah diterapkan Turki perlu direvisi bahkan diubah karena tidak sesuai dengan semangat masyarakat Turki. Seiring waktu, Milli Görüs berkembang menjadi partai. Dalam beberapa kesempatan, partai yang didirikan oleh basis massa Milli Görüs terus berubah karena adanya tekanan politik dari pihak berkuasa.[2]Ditengah-tengah upaya perebutan pengaruh Islam di Turki yang menganut paham Sekuler, muncullah seorang presiden yang memiliki spirit keislaman, yaitu presiden Erdogan.Berkuasanya Erdogan menjadikan Turki sebagai topik hangat dalam perpolitikan internasional. Banyak kebijakan Erdogan dianggap mengalami pergeseran dari pemerintahan sebelumnya. Kebijakan luar negeri Erdogan dianggap lebih Islami oleh dunia internasional.[3]

Namun, keberhasilan Erdogan dalam membangun Turki memberikan dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan nasional di internal Turki.Salah satu dampak positifnya adalah kini Turki telah bebas menggunakan simbol-simbol Islam sebagai identitas Turki, dan Erdogan hadir sebagai penakluk sekularimse Turki.Sedangkan dampak negatifnya adalah banyak pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Erdogan, sampai mengakibatkan terjadinya kudeta militer Turki pada Juli tahun 2016.Dilihat dari kejadian kudeta militer pada Juli tahun 2016 kemarin, bahwa terjadinya kudeta dilakukan oleh “struktur paralel” yaitu merujuk kepada sekelompok birokrat yang berafiliasi kepada gerakan Gülen. Erdogan memberikan tuduhan kepada Fethullah Gülen yang terlibat dalam kudeta berdarah di Turki. Dan para pelaku kudeta tersebut merupakan para pejabat tinggi di birokrasi sipil, kejaksaan dan aparat keamanan yang bekerja dalam jaringan rahasia mereka. Para pengikutnya di birokrasi sipil,

---

[1] S. Calleya, M. Wohlfeld (ed), 2012,*Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean*, Malta: University of Malta, hlm. 370-371.

[2]*Ibid.*, hlm. 23.

[3] Atika Puspita Marzaman, 2013, *Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Intervensi NATO ke Libya*, Tesis, Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, hlm. 1.

kejaksaan, kepolisian dan di militer lebih loyal kepada perintah Gülen ketimbang institusi dimana mereka bekerja.

Gülen memiliki gerakan yang diibaratkan seperti Ormas Islam dan sekarang popular dengan sebutan Hizmet. Bedanya gerakan ini tidak bergerak dalam bidang sosial. Hizmet adalah organisasi gerakan yang diinspirasi oleh sikap Fethullah Gülen, seorang pengkhutbah Turki yang kini berbasis di Amerika Serikat.[4] Gerakan Gülen ini memiliki jaringan yang sangat luas bahkan tersebar hingga ke luar negeri. Gerakan ini merupakan gerakan yang sangat rahasia sehingga Erdogan sebagai pemegang tampuk kekuasaan di Turki sulit untuk menjalin kerjasama, maka eksistensi *Nation State* Turki terancam oleh gerakan transnasional Gülenis. Dan lebih terancamnya lagi para pengikut Hizmet ini menempati posisi-posisi penting di Turki.Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan menetapkan bahwa Hizmet merupakan organisai terlarang dan menggolongkan gerakan ini merupakan gerakan teroris. Dimana tujuan dari Hizmet atau kelompok teror Gülen ingin menjatuhkan pemerintahan.Menurut penulis, kebijakan pemerintah Turki terhadap organisasi-organisasi terlarang tersebut akan berdampak kepada negara-negara lain. Contohnya, baru-baru ini salah satu WNI di tangkap polisi setempat gara-gara diduga ikut dalam organisasi terlarang yang bernama Hizmet. Disamping itu, hubungan Turki dengan Amerika juga akan mengalami kesurutan disaat Amerika dituduh berperan dan terlibat dalam kasus kudeta di Turki. Dan tuduhan ini akan membahayakan hubungan bilateral antara Turki dan Amerika.

Kerangka Berpikir

Teori yang digunakan penulis adalah Teori Pembuatan Putusan. Dalam istilah David Easton, putusan adalah "output" luaran sistem politik, yang dengan sistem itu nilai-nilai dialokasikan dalam masyarakat secara otoritatif (dengan penggunaan kekuasaan). Decision-making adalah "simply the act of choosing among available alternatives about which uncertainty exists" (sekadar tindakan memilih alternative yang tersedia yang di situ terdapat ketidakpastian). David Easton telah mendefinisikan politik sebagai "alokasi nilai-nilai secara paksa bagi suatu masyarakat," atau "the authoritative allocation of values for a society". Ini pada hakekatnya adalah intisari dari pembuatan putusan politik.

Sekumpulan unit-unit yang membentuk sistem politik bertujuan membuat keputusan untuk masyarakat. Keputusan-keputusan yang menyangkut tujuan-tujuan negara di lingkungan eksternal, sarana dan sumberdaya yang digunakan untuk mengejar tujuan itu, dan memuat tanggapan sistem politik itu terhadap tuntutan dari lingkungan eksternal adalah keputusan-keputusan politik luar negeri. Sebagai sistem terbuka sistem politik berhubungan terus-menerus dengan lingkungannya melalui penerimaan input, dalam bentuk tuntutan dan dukungan dari lingkungannya, dan melalui output, yang berupa upaya sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau untuk mengendalikannya. Proses merubah input menjadi output itulah proses pembuatan keputusan.

Suatu keputusan telah dibuat dan tindakan telah diambil oleh suatu sistem, tindakan itu –yaitu output- menjadi bagian dari lingkungan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa lingkungan itu telah dirubah oleh output sistem. Namun, cara paling tepat menggambarkan hubungan antara sistem dengan lingkungannya itu adalah sebagai hubungan timbal-balik yang dinamik. Yaitu lingkungan mempengaruhi sistem; sistem mempengaruhi lingkungan; dan lingkungan yang terpengaruh ini mempengaruhi sistem itu lagi. Walaupun proses

[4]*Hizmet Organisasi Terlarang di Turki yang Membuat WNI dipenjara*, http://news.detik.com,akses pada tanggal 31 Agustus 2016, pukul 14:08.

pembuatan keputusan dalam sistem politik jelas jauh lebih kompleks, unsur-unsurnya yaitu meliputi kegiatan: penerimaan input, interpretasi input, dan penterjemahan ke dalam output. Output itu menjadi bagian dari lingkungan, yang pada gilirannya menghasilkan input baru.

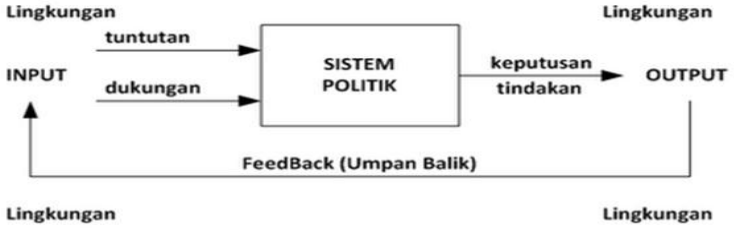

(Skema Sistem Politik David Easton)

Relevansi dari teori pembuatan keputusan adalah bahwa pengaruh atau tuntutan kepada pemerintah diikuti dengan terjadinya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok faksi di angkatan tubuh militer Turki dan struktur paralelnya yang berafiliasi dengan gerakan Gülen, sehingga Presiden Erdogan mengecam dan membuat keputusan dengan melarang seluruh aktivitas yang berhubungan dengan Gülenisme, namun keputusan yang telah dibuat oleh Presiden Erdogan terhadap sekelompok yang pro dengan Gülen berdampak pada politik dan Hubungan Internasionalnya, sehingga melahirkan output-output baru.

Dan melihat dari kejadian kudeta yang gagal pada Juli 2016 lalu, dimana Presiden Erdogan membuat kebijakan dengan menetapkan dan memutuskan kepada kelompok Gülenisme sebagai gerakan terlarang dan harus dihapuskan, karena kelompok Gülenisme sebagai dalang dari terjadinya kudeta militer di Turki. Sehingga Erdogan melakukan penjagaan yang sangat ketat terkait dengan kelompok Gülenisme, terkhusus kepada para pejabat pemerintah. Dan implikasi logis dari penerapan teori pengambilan putusan berdampak juga bagi lembaga-lembaga yang berada di negara lain yang terjaring dengan kelompok Gülenisme. Dan tentu ini dapat berakibat terhadap hubungan bilateral negara.

Teori selanjutnya yang penulis gunakan adalah Teori Kudeta, yaitu merujuk pada suatu sikap dari tuntutan terhadap pemerintah. Kudeta adalah peristiwa yang jauh lebih demokratik. Bisa dilaksanakan dari “luar” dan bergerak dalam wilayah di luar pemerintah tetapi di dalam negara yang dibentuk oleh jajaran pegawai negeri yang permanen dan professional, angkatan bersenjata dan polisi. Tujuannya adalah untuk melepaskan pegawai-pegawai tetap negara dari kepemimpinan politik, dan ini biasanya tidak bisa terjadi jika keduanya diikat oleh kesetiaan-kesetiaan politis, etis atau tradisioanl.

Dalam bagian-bagian aparatus negara yang lebih penting, angkatan bersenjata, polisi, dan dinas keamanan, semua karakteristik-karakteristik di atas diintensifkan, dengan tingkat disiplin dan kekakuan yang lebih besar. Karena itu aparatus negara sampai sejauh tertentu merupakan “mesin” yang biasanya akan bertindak dalam cara yang sudah bisa diduga dan otomatis. Kudeta beroperasi dengan memanfaatkan perilaku yang bagai mesin ini: selama kudeta, karena ia memakai bagian-bagian dari aparatus negara untuk merebut kekuasaan; setelah kudeta, karena nilai “tuas-tuas” tergantung pada kenyataan bahwa negara adalah sebuah mesin. Gejolak politik di level pusat, salah satu contohnya adalah kudeta, dan selalu

memberikan implikasi terhadap kondisi masyarakat sipil. Kudeta yang dapat diartikan sebagai upaya pergantian kekuasaan terhadap seorang aktor yang memiliki legitimasi untuk memerintah, dengan cara yang illegal dan sering kali erat dengan prinsip-prinsip vandalisme ini tentu tidak dapat diterima begitu saja oleh masyarakat di suatu negara. Gejolak ini menyebabkan terbukanya struktur kesempatan politik yang dapat dimaksimalkan oleh kelompok-kelompok di level masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan mereka. Lebih jauh lagi, proses artikulasi dari kepentingan ini dapat bertransformasi dan terinstitusionalisasi menjadi suatu partai politik.

Dan kudeta yang terjadi di Turki pada tahun 2016 merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh sekelompok bersenjata yang terdiri dari militer atau tentara yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan Erdogan. Kemudian, mereka melakukan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah tradisonal, lalu menciptakan elit birokrasi baru. Namun upaya kudeta tersebut gagal, dimana kudeta tersebut tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Turki.

SISTEM POLITIK TURKI PRA-KUDETA

1. Erdogan Sebagai Pemimpin Politik Turki

Recep Tayyep Erdogan dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, kharismatik, pemberani dan sangat ramah dengan rakyatnya.Dibawah kepemimpinan Erdogan, Turki menggali kembali pada masa lalunya yaitu berada pada puncak kejayaan, dan Erdogan berhasil membawa Turki pada masa perbaikan dan perdamaian.Salah satu pemimpin yang masih memegang kuat ajaran Islam dan kekhalifahan.Pada pemerintahannya Turki mencapai kemajuan yang pesat baik dari segi politik maupun ekonominya.Erdogan juga telah berulangkali memperoleh prestasi yang mengesankan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.[5]Dibawah kepemimpinannya, Erdogan menjalin hubungan baik dengan negara-negara Islam. Erdogan telah membuat kebijakan-kebijakan kontroversial sejak ia menjabat menjadi Perdana Menteri Turki. Sebetulnya, sosok kepemimpinan dan karier Erdogan yang sangat cemerlang dalam dunia politik sudah terbukti saat ia menjabat sebagai walikota Istanbul pada tahun 1994 sampai tahun 1998. Banyak perubahan yang telah dilakukan Erdogan saat ia menjabat sebagai walikota, prestasi yang paling menonjol pada saat itu adalah Erdogan berhasil menyelesaikan masalah air, menertibkan bangunan, mengurangi kadar polusi dengan cara aksi menanam pohon dan memberikan pekerjaan kepada wanita muda untuk untuk menghindari praktik prostusi liar. Sehingga prestasi itu menjadi nilai tambah bagi Erdogan dimata masyarakat dan parlemen sampai pada akhirnya ia menjabat sebagai Perdana Menteri Turki pada tahun 2003 sampai tahun 2014, bersama dengan partai yang dibawanya sampai puncak kekuasaan yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalet ve Kalkinme Partisi*-AKP). Dalam politik moderatnya, Erdogan selalu menjaga hubungan dengan berbagai kelompok didasari pada kecerdasan politik yang dimilikinya.Ia bekerja berdasarkan keteguhan semangat politikya yang jauh dari ekstremisme keagamaan, apalagi *background* islami yang menjadi ciri khasnya.[6]

2. Persekutuan Erdogan dan Gulen

[5] Atika Puspita Marzaman, *op.cit*, hlm. 63.

[6]Syarif Taghian, 2012, *Etdogan Muadin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 36.

Hubungan antara Erdogan dan Gülen sebenarnya sudah berlangsung lama dan menjalin hubungan yang sangat baik, dimana gerakana Gülen merupakan pendukung kuat Erdogan.Dan Gülen merupakan sahabat dan juga sekutu bagi Erdogan pada saat Erdogan masih menjabat sebagai perdana menteri Turki. Erdogan dan Gülen merupakan sosok intelektual Turki, diantara keduanya sangat menekankan demokrasi yang menjadi prioritas dan mengadopsi sekularisme secara pasif. Walaupun pada akhirnya mereka memiliki pendapat yang berbeda tapi pandangan mereka tidak bisa dipisahkan dari pandangan-pandangan yang Islamis.Dalam bukunya Syarif Taghian mengatakan bahwa Fethullah Gülen merupakan guru sejati Erdogan dan juga guru spiritual bagi AKP.Dimana Gülen berperan penting dalam keberhasilan karir politik Erdogan dan naiknya AKP ke puncak kekuasaan.Bahkan jaringan Gülen yang bekerja di institusi kehakiman dan kepolisian mendukung upaya dalam penyingkiran musuh pemerintah, khusunya anggota militer yang merupakan pengikut garis keras sekularisme atau disebut pengikut Kemalist yang selalu merancang upaya kudeta bagi partai-partai Islam.

3. Jaringan Fetullah Gulen

Perkembangan PASIAD sebagai suatu asosiasi tidak dapat dipisahkan dari Fetullah Gülen, seorang tokoh Islam Moderat. Gülen dan ide-idenya tentang perpaduan antar nilai keagamaan dan pengetahuan modern telah menjadi motor yang menggerakan PASIAD menjadi suatu organisasi besar yang melahirkan sekolah-sekolah PASIAD di berbagai negara. Fetullah Gülen (Hoca Effendi) lahir di Pasinler, Erzurum, Turki pada awal tahun 1940. Beliau lahir dari keluarga cendekiawan yang agamis. Gülen muda telah diajarkan Al-Qur‟an, bahasa Arab, prinsip serta ide dari Sufisme. Setelah lulus dari sekolah privat keagamaannya di Erzurum, Gülen mendapatkan lisensi untuk berdakwah secara umum. Gülen memulai karirnya pada akhir tahun 1950, sebagai Imam yang mendapatkan gaji dari negara. Pada tahun 1960, Gülen pindah ke Izmir dan mulai melakukan dakwah secara berpindah-pindah secara mandiri. Tema dakwah Gülen lebih luas dari tema yang biasa diambil para Imam pada masa itu. Tema dakwah dari Gülen berfokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, pembentukan Islam, ekonomi dan keadilan sosial. Setelah mendalami aliran tokoh Sufi terkenal Turki, Beiduzzaman Said Nursi, Gülen terpengaruh ide Nursi untuk mengakomodasi Islam menjadi modern dan menemukan harmoni antara alasan ilmiah dan kebenaran agamis.[7]

Melalui pemikirannya ini, Gülen mendapatkan pengaruh yang kuat pada hubungan antara Muslim dan Barat, sekaligus menginspirasi banyak orang. Dalam beberapa tahun, pengikut Gülen semakin bertambah dan membentuk suatu asosiasi tersendiri. Hingga saat ini, Gülen terus mendedikasikan hidupnya menjadi sebuah isu kontemporer, sekaligus mempromosikan Islam yang terbuka pada dunia. Gülen dan asosiasinya kemudian menjadi icon dari Turki yang Islami namun terbuka pada pengetahuan modern. Asosiasinya yang kini tersebar di berbagai negara di dunia ini, sekarang bukan hanya terkenal akan penyebaran ide Gülen saja namun juga bersama itu memperkenalkan pula budaya Turki ke seluruh dunia.[8]Gülen yang memiliki latar belakang agama yang kuat mencoba menyelaraskannya dengan keadaan negara Turki yang menganut faham sekuler pada masanya. Hasilnya adalah pemikirannya yang cenderung mengarah pada Islam moderat yang kini dipeluk oleh mayoritas masyarakat Turki. Gülen

[7] Novian Uticha Sally, 2014, *PASIAD sebagai Soft Power Turki di Indonesia*, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, hlm.25.

[8] *Ibid.*

kemudian menjadi tokoh Islam moderat yang termasyur di Turki. Cita-cita yang ingin diwujudkannya sebagai tokoh Islam moderat di Turki adalah dengan terciptanya generai emas. Generasi emas yang diharapkan oleh Gülen adalah terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan berimbang antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Gülen selalu percaya bahwa keseimbangan antara agama dan pendidikan akan melahirkan generasi penerus yang cemerlang untuk membangun masa depan.[9]

Dalam mewujudkan cita-citanya tersebut, Gülen menggunakan cara perekrutan simpatisannya dengan metode mercusuar. Metode ini dilakukan dengan cara merekrut menggunakan kontak personal dan memperluas nya melalui rentetan lingkaran pelajar. Pengikut Gülen selalu berusaha memperbaiki diri dan lingkungannya melalui penelitian, proyek dan integritas personal.[10] Cara ini terbukti mampu memperbesar kelompok simpatisan Gülen bukan hanya di Turki namun juga secara internasional. Sistem mercusuar ini akan terus memancarkan ide dan nilai yang dipegang oleh Gülen beserta budaya Turki yang berusaha dikembangkannya. Hal ini menempatkan ide yang dipegang Gülen dan budaya Turki seperti inti cahaya mercusuar yang sinarnya (berupa kelompok simpatisannya) berpendar kian lama kian besar bahkan mencapai dunia internasional.[11]

HUBUNGAN BILATERAL TURKI

1. Hubungan Turki dan Amerika Serikat

Beberapa akademisi seperti Fawaz Gergez mencoba menganalisa politik luar negeri AS terhadap Islam, khususnya political Islam. Analisa dimulai dari apakah political Islam bertentangan dengan kultur AS (Barat) atau hanya ditataran kepentingan AS. Gergez yang memulai analisanya dengan pertanyaan *America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of Interest*? Membenarkan bahwa secara luas kultur Islam membuat beberapa kebijakan AS di Timur Tengah mengalami kendala dalam proses perumusan kebijakan, namun secara komprehensif, pertentangan AS bukan terhadap Islam, melainkan pada kepentingan.[12]

Analisa selanjutnya dilakukan oleh Marie de Ceu Pinto yang setuju akan adanya *clash interest* antara Barat dan political Islam. Analisa yang dilakukannya berdasarkan studi terdahulu yang pernah dikaji oleh Fuller dan Lesser dengan melihat keganjilan antara Barat dan Islam secara garis besar tidak didasari atas masalah teologi, melainkan masalah politik, ekonomi, strategi psikologikal, dan faktor budaya.[13]*Clash of interest* antara AS (Barat) dan political Islam disebabkan oleh, pertama interpretasi Barat terhadap political Islam belum sepenuhnya menyentuh kepentingan kedua belah pihak. AS masih kekurangan pengetahun dalam memahami political Islam yang menyebabkan cederanya politik luar negeri yang akan dijalankannya pada proses implementasi. Hal ini diakibatkan oleh sikap acuh tak acuh AS terhadap Islam dan kebijakan nasional yang dihasilkan dari political Islam tersebut, baik itu yang bersifat luar maupun dalam negeri. Kedua, tidak adanya konsensus yang tercipta antara Barat dan political Islam yang muncul setelah peristiwa Perang Dingin, disisi lain, political Islam malah dianggap

---

[9]*Ibid.*, hlm. 26.

[10] S. Shroff, 2009, *Muslim Movements Nurturing A Cosmopolitan Muslim Identity: The Ismaili and Gülen Movement*, Georgetown University, Washington D.C., hlm. 71.

[11] Novian Uticha Sally, *op.cit*., hlm. 27.

[12] Fawaz Gergez dalam Lorenzo Vidino, 2013, *The West and The Muslim Brotherhood After The Arab Spring*, Al Mesbar Studies & Research Center and Foreign Policy Institute, Hlm.6.

[13]*Ibid.*, Hlm.7.

sebagai musuh, menggantikan komunisme yang tidak mampu bertahan selama masa Perang Dingin.[14]

Sebelum peristiwa Arab Spring, isu political Islam sempat mencuri perhatian media pada peristiwa 9/11. Banyak para pengamat mencoba membedakan karakteristik political Islam dengan gerakan terorisme internasional. Para sosiolog juga mencoba menyebarluaskan pengamatan terhadap fenomena ini dengan mengkaitkan fenomena ini dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Timur Tengah. Asumsi yang mengatakan bahwa political Islam yang muncul disaat peristiwa Arab Spring didasari atas gerakan *religious-based* patut dipertanyakan kembali setalah ditemukan ketidakpuasan masyarakat di Timur Tengah dan keberanian beberapa kelompok masyarakat untuk menentang pemerintahan yang terkesan dengan otoritarianisme.[15]Setelah peristiwa 9/11, Islam selalu disinonimkan dengan kata *international terrorism* oleh pihak Barat sebagai aktor yang memerankan *global devil* di abad 21, menggantikan posisi komunis di zaman Perang Dingin. Pandangan itu berubah sejalan dengan kehadiran fenomena political Islam yang memaksa Barat untuk lebih mengenal dan memahami Islam lebih dari menyatakan bahwa Islam merupakan bentuk ancaman terorisme internasional dengan Osama bin Laden sebagai simbol pasca peristiwa 9/11.[16]

Dalam beberapa tahun terakhir, politik luar negeri AS di Timur Tengah mulai dihubungkan dengan istilah *the Islamist dilemma* yang menimbulkan pertanyaan bisakah AS tetap konsisten untuk mempromosikan demokrasi di Timur Tengah tanpa membawa resiko untuk membawa aspek Islam dalam kekuasaan?[17] Untuk pilihan tersebut, AS tidak memiliki pilihan, setelah beberapa revolusi terjadi di Timur Tengah diawali dengan Tunisia, Mesir, dan Libya menempatkan AS dalam posisi harus mengenal lebih dalam terhadap political Islam.[18] Latar belakang ini tentu akan memberikan dampak terhadap pandangan AS kepada Turki.Sejak Erdogan memimpin Turki dan berhasil membawa Partai Keadilan dan Pembangunan sampai pada puncak kekuasaan, kini ia mampu mengembalikan kedudukan Turki yaitu berada pada masa perbaikan dan perdamaian. Berkuasanya Erdogan menjadikan Turki sebagai topik hangat dalam perpolitikan internasional.Banyak kebijakan Erdogan dianggap mengalami pergeseran dari pemerintahan sebelumnya.Kebijakan luar negeri Erdogan dianggap lebih islami oleh Dunia Internasional.[19]Turki bukanlah Turki yang dulu kita kenal. Sekarang ia adalah Turki yang berani melepaskan diri dari peranannya sebagai sekutu setia Amerika Serikat dan mencoba menerapkan agenda dan program kebijakan politik luar negeri yang lebih rasional dan logis. Turki telah menjadi salah satu kekuatan penting untuk menciptakan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah.[20] Dan kini

---

[14] Herry Wahyudi, 2016, *Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kudeta Mesir 2013*, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, hlm. 50.

[15]*Ibid.*, hlm.61.

[16] Kayhan Delibas, 2009, *Conceptualizing Islamic Movements: The Case of Turkey. International Political Science Review*, (Vol. 30, No. 1), Sage Publications, Ltd., hlm. 90 diakses melalui http://www.jstor.org pada tanggal 22 Januari 2017, pukul 17:15.

[17] Shadi Hamid, 2011, *The Rise of The Islamist Will Change Politics, and Vice Versa*, Foreign Affairs, (Vol. 90, No. 3), Sage Publications, Ltd., hlm. 40, diakses melalui http://www.jstor.org pada tanggal 22 Januari 2017, pukul 17:15.

[18] Herry Wahyudi, *op.cit*., hlm.61.

[19]Atika Puspita Marzaman, *op.cit*, hlm. 1.

[20] Syarif Taghian, *op.cit*, hlm. 415.

Turki mampu menyaingi Amerika Serikat sebagai negara super power, dimana hubungan kerjasama yang dijalin Turki dengan Amerika Serikat berada pada otoritas Turki.

2. Hubungan Turki dan Rusia

Hubungan antara Rusia dan Turki bukanlah hubungan yang selalu mulus.Sejarah mencatat bahwa hubungan antara keduanya dihiasi dengan berbagai pencapaian, tetapi tidak sedikit pula diliputi berbagai kerumitan.Dan tercatat bahwa keduanya sudah beberapa kali melakukan peperangan antara satu sama lain.[21] Hubungan antara Moskwa dan Ankara kembali memburuk setelah Konvensi Montreux pada tahun 1936 yang mengatur dikembalikannya Selat Turki dan penguasaan sepenuhnya perairan itu oleh pemerintahan Ankara. Kemudian pada tahun 1945 Joseph Stalin meminta kembali Selat Turki.Dan selama 45 tahun Perang Dingin, Turki dan Rusia bersebranagan.Kemudian bergabungnya Turki dengan NATO pada tahun 1952, yang menjadikannya negara anggota kedua yang berbatasan dengan Uni Soviet melawan Pakta Warsama selama Perang Dingin.[22]Sehingga pada saat itu, hubungan antara Turki dan Rusia terbilang sangat buruk.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, hubungan antara Turki dan Rusia membaik dan kedua negara menghasilkan banyak kerjasama di bidang energi manufaktur. Dan Turki menjadikan Rusia mitra dagang kedua terbesar Turki setelah Jerman.[23]Selain itu banyak perusahaan Turki yang mulai beroperasi di Rusia. Namun, hubungan bilateral kedua negara ini kembali bertikai, memuncak setelah terjadinya insiden jatuhnya jet Rusia.[24] Penembakan jatuh Sukhoi Su-24 Rusia itu dilakukan oleh pesawat tempur F-16 Turki di dekat perbatasan Turki-Suriah pada 24 November 2015. Namun lagi-lagi, hubungan buruk diantara keduanya tidak berlangsung lama. Keduanya kembali membaik pasca-kudeta Turki tahun 2016, dimana Gullen yang dianggap sebagai dalang kudeta diberikan jaminan keamanan oleh Amerika Serikat. Sehingga hubungan luar negeri Turki mutlak akan menjalin kedekatan dengan Rusia, rival utama Amerika Serikat.

Realita politik yang berkembang dan diperlihatkan dua negara tersebut yaitu antara Rusia dan Turki hamper bisa dikatakan sangat mirip dari segi pengalaman politik yang tanpa koalisi dan kesepatan pelaksanaan agenda dengan tujuan-tujuannya, serta strategi penerapannya. Meskipun terdapat perbedaan ideologi dan strategi antara keduanya, akan tetapi pengalaman Vladimir Putin (yang merupakan tokoh terkuat Turki sejak runtuhnya Uni Soviet) memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman politik gaya Recep Tayyeb Erdogan (seorang tokoh terkuat sejak berdirinya Republik Turki). Masing-masing dari keduanya memiliki pengalaman politik yang unik; keduanya berhasil menggerakkan kebijakan sebagaimana mereka kehendaki dan tentunya didasari dengan kompetensi dan ketrampilan luar biasa tanpa menimbulkan suatu kegaduhan dan friksi-friksi berarti ataupun melakukan kesalahan.[25]

---

[21] *Tak Selalu Mulus Bagaimana Sejarah Hubungan Rusia Turki Sebenarnya*, akses dari http://indonesia.rbth.com, pada tanggal 25 Januari 2017, pukul 20.00 WIB

[22]*Menilik Sejarah Panjang Konflik Rusia-Turki*, akses dari http://m.cnnindonesia.com, pada tanggal 22 Januari 2017, pukul 16.55.

[23]*Ibid.*

[24] *Ibid.*

[25] Syarif Taghian, *op.cit*., hlm. 389.

3. Hubungan Turki dan Indonesia

Hubungan Indonesia dan Turki sebenarnya telah berlangsung sejak lama, bahkan pada jaman kerajaan. Sultan Aceh pernah meminta bantuan Kerajaan Ottoman (sekarang Turki) untuk memerangi kolonialisme penjajah dari Portugis, Belanda, Perancis dan Inggris sejak abad ke 16 hingga akhir abad 19. Pada masa itu, Kerajaan Ottoman adalah negara muslim terkuat, dan kesultanan Ottoman memperoleh predikat „Khalif" yang berarti pemimpin semua umat muslim. Sehingga, Kerajaan Ottoman memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan melindungi semua komunitas muslim, bahkan yang berada di luar batas teritorialnya.Hubungan keduanya kian erat setelah kemerdekaan Indonesia dan adanya pengakuan Turki atas pencapaian tersebut. Hubungan diplomatis kedua negara juga terus meningkat melalui beberapa organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), G-20, D-8, dan forum regional ASEAN.[26]

Hubungan Turki dan Indonesia telah dimulai pada 29 Desember 1949.Pada saat itu Turki mulai memberikan pengakuan secara de jure atas kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.Meskipun demikian, karena situasi politik Indonesia yang kurang kondusif saat itu, hubungan diplomatik kedua negara baru muncul pada tahun 1957. Hubungan ini ditandai dengan pembukaan kantor kedutaan Turki pada 10 April di tahun tersebut. Kedutaan tersebut mencakup penanganan urusan administratif antara Turki dan Indonesia di seluruh nusantara.[27] Indonesia dan Turki adalah mitra startegis sejak 5 April 2011 dengan ditandainya kesepakatan antara kedua negara dengan penandatanganan deklarasi "Indonesia-Turki: Menuju Kemitraan Ditingkatkan dalam pengaturan New World". Dokumen itu berisi kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang, termasuk politik.[28]Meningkatnya hubungan kemitraan strategis antara Turki dan Indonesia dapat dilihat dari bidang perdagangan, dimana Turki merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.Pada bulan April 2016 lalu, Indonesia dan Turki juga melakukan kesepakatan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan kerjasama counter terrorisme. Kemudian pertemuan antara Menlu RI dan Menlu Turki pada April tahun 2016 lalu banyak membahas kerjasama bilateral antara kedua negara tersebut, antara lain membahas pelaksanaan SKBIT (Sidang Komisi Bersama Indonesia- Turki) bidang ekonomi, dengan tujuan unutk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara tersebut. Kedua Menlu juga membahas kemajuan kerjasama di bidang industri strategis, antara lain kerjasama di bidang alat komunikasi pertahanan untuk perbatasan, dan joint development of medium tank. Terkait kerjasama di bidang counter terrorism, kedua Menlu melakukan tukar informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam melawan ektremisme dan terrorisme. Dalam hal ini Menlu RI menegaskan kembali bahwa "Kerjasama pertukaran data intelijen sangat penting untuk ditingkatkan".[29]

Kesepakatan kembali dilakukan pada Oktober 2016 lalu, dimana antara Indonesia dan Turki sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis diantara kedua negara melalui peningkatan kerjasama di bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya

---

[26] Novian Uticha Sally,*op.cit.*, hlm.93.

[27]*Ibid.*, hlm.3.

[28]*Indonesia dan Turki Memperkuat Kerja Sama Pertahana*, https://lancercell.com, akses pada tanggal 18 Januari 2017, pukul 16.00.

[29] *Indonesia-Turki Sepakat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi dan Counter Terrorisme*, http://www.kemlu.go.id, akses pada tanggal 18 Januari 2017, pukul 20.00.

dan konsuler. Penguatan kemitraan strategis kedua negara ini telah disepakati dalam pertemuan Forum Konsultasi Politik Bilateral (FKB) RI-Turki yang ke-5 yang telah dilaksanakan di Lombok, 7-9 Oktober 2016.[30] Untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam peningkatan hubungan kedua negara, kedua pihak sepakat untuk menyusun sebuah dokumen Action Plan.Selain itu, Rencana Aksi tersebut diharapkan dapat menandai era baru hubungan bilateral yang diisi oleh kerja nyata untuk merealisasikan komitmen-komitmen dalam Deklarasi Kemitraan Strategis yang disepakati oleh Presiden RI dan Presiden Turki pada tahun 2011.[31]

Di bidang kerjasama ekonomi, khususnya di sektor investasi dan perdagangan, Indonesia dan Turki mengakui bahwa tidak hanya terdapat potensi sangat besar yang belum tergali, namun juga sejumlah hambatan yang masih mewarnai hubungan ekonomi dua negara.Untuk itu, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan pertukaran misi dagang yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada.[32] Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kedua pihak sepakat untuk mendorong peningkatan saling kunjung dan kerjasama di sektor industri pertahanan melalui kerjasama pengembangan dan produksi sejumlah alutsista. Kedua pihak juga menyampaikan pentingnya untuk segera memfinalisasi drat MoU Kerjasama Kepolisian.[33]Dalam bidang pendidikan, terdapat sekolah-sekolah Turki yang di kembangkan di Indonesia. Dan ini merupakan bentuk hubungan kerjasama antara Turki dan Indonesia.Atau sebagai bentuk Soft Policy Turki. Sejak Erdogan memipin Turki, ia mampu memperbaiki hubungannya dengan negara-negara yang dulunya bermusuhan seperti hubungan dengan Suriah dan Iran yang selalu menegang dan selalu mengarah pada hubungan yang negatif, kini menjalin hubungan lebih terbuka dan positif dengan semua kalangan.

Perkembangan hubungan Turki dan Indonesia pertama kali bermula dengan didirikannya sekolah PASIAD yang merupakan organisasi swasta besar Turki di Indonesia. Pada akhir tahun 1994, PASIAD mendirikan sekolah di Jakarta, disebut dengan Kharisma Bangsa. Setahun setelah itu Presiden Turki Süleyman Demirelmengadakan kunjungan singkat ke Indonesia di samping untuk meresmikan sekolah PASIAD tersebut.[34]PASIAD memiliki peranan penting dalam hubungan antara Indonesia dan Turki paska perang dingin. Kunjungan pertama Perdana Menteri Turki, Reccep Tayip Erdogan, ke Indonesia pada 2004 difasilitasi oleh PASIAD. Peristiwa tersebut mendukung semakin harmonisnya hubungan antara Indonesia dan Turki. Setiap kunjungan tokoh pemerintahan Turki ke Indonesia selalu diagendakan untukmelakukan kunjungan ke sekolah PASIAD. Hal ini dikarenakan di PASIAD sendiri terdapat banyak guru, staff maupun pembina yang merupakan Warga Negara Turki. Warga Negara Turki yang bekerja di Indonesia tersebut tentu masih merupakan tanggung jawab dari pemerintah Turki. Mengingat banyaknya sekolah PASIAD yang ada di Indonesia, berarti semakin banyak pula Warga Negara Turki yang berada di Indonesia. Untuk itulah, pemerintah Turki selalu menjadikan PASIAD sebagai prioritas dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia.[35]

---

[30]*Indonesia dan Turki Sepakat untuk Memperkuat Kemitraan Strategis,* http://www.kemlu.go.id, akses pada tanggal 18 Januari 2017, pukul 20.15.

[31]*Ibid.*

[32]*Ibid.*

[33]*Ibid.*

[34]*Ibid.*

[35]*Ibid.*

Menurut data TUSKON, terdapat 250 Warga Negara Turki yang tinggal di Indonesia. Sebagian besar komunitas tersebut adalah guru yang bekerja untuk sekolah PASIAD[36].Warga Negara Turki tersebut kebanyakan mendapatkan visa bekerja bagi yang turun sebagai tenaga ahli dalam mengajar di PASIAD. Sebagian lainnya mendapatkan visa belajar, pihak yang mendapatkan visa belajar ini adalah beberapa pembina asrama yang merupakan Warga Negara Turki yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di Indonesia. Untuk melanjutkan pendidikannya di Indonesia, para pembina mendapatkan beasiswa dari PASIAD Indonesia, dan fasilitas berupa tempat tinggal beserta sarana dan prasarananya. Akan tetapi, karena tinggal di asrama yang disediakan oleh PASIAD, para pembina tersebut memiliki kewajiban untuk menjadi teladan bagi siswa-siswa sekolah PASIAD yang tinggal di asrama. Setelah para pembina lulus, mereka dapat memilih untuk kembali pulang ke Turki atau menjadi guru PASIAD dan mendapatkan visa bekerja. Oleh karena itu, jumlah pengajar yang ada di sekolah PASIAD semakin hari semakin bertambah, dan ini berarti semakin banyak pula Warga Negara Turki di Indonesia. Hal ini membuktikan pentingnya peran PASIAD dalam hubungan antara Turki dan Indonesia.[37]

Dalam rangka penguatan hubungan dengan negara-negara Asia Pasifik, Turki banyak melakukan hubungan baik regional maupu multilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik, khususnya Indonesia. Indonesia dipandang merupakan partner yang kuat bagi Turki karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Posisi Indonesia yang kuat di ASEAN dan bahkan kini namanya di PBB tengah naik sebagai negara dengan penanganan HAM yang baik dan tingkat demokrasi yang tinggi.[38]Salah satu wujud dari keseriusan Turki untuk membina hubungan dengan negara-negara Asia Pasifik adalah dengan mendirikan D8. Organisasi ini terbentuk pada tahun 1996. Negara yang tergabung dalam D8 antara lain adalah Turki, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, N igeria dan Mesir. Organisasi ini merupakan organisasi yang mewadahi negara-negara Islam berkembang dalam meningkatkan ekonomi dan industrinya. Selain itu, Turki juga menandatangi perjanjian Kerjasama dan Persahabatan dengan ASEAN pada 2010. Bersamaan dengan itu, Turki juga menandatangani instrumen dari Traktat Persahabatan dan Kerjasama, yang menjadikannya negara ke 28 non ASEAN yang melakukan hal serupa.[39]

KRONOLOGI KUDETA TURKI 2016

Berikut kronologi kudeta militer Turki2016:

1. Pergerakan militer keluar dari barak terjadi Jumat (15/7) pukul 22.00 waktu setempat di Ibu Kota Ankara dan Istambul.
2. Pukul 22.30, militer sudah memblokir jembatan Fatih Sultan Mehmet di atas selat Bosphorus yang menghubungkan Istambul dengan daratan Turki sisi Asia. Bus dan mobil pribadi diminta untuk putar balik.
3. Pukul 22.55 terdengar tembakan di beberapa lokasi Ankara. Para pengkudeta meluncurkan jet tempur.

---

[36]*Duta Besar Turki untuk Indonesia, Hubungan di Bidang Kebudayaan dan Pendidikan (Daring)*, 2009, http://mfa.gov.tr, akses pada 22 Januari 2017, pukul 17:19.

[37] Novian Uticha Sally, *op.cit*., hlm.99.

[38]*Ibid.*

[39]*Ibid.*, hlm.100.

4. Pukul 23.00, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim membenarkan adanya kudeta. Dia memperoleh informasi intelijen jika aksi penggulingan pemerintah ini didalangi oleh segelintir pejabat militer.
5. Pukul 23.33, tentara memasuki gedung stasiun televisi TRT yang dimiliki pemerintah. Mereka meminta sebagian staf pergi, mencabut sambungan telepon, lalu memaksa penyiar membacakan maklumat kudeta.
6. Pukul 24.00, Presiden Reccep Tayyip Erdogan dilaporkan dalam kondisi aman. Kudeta ini terjadi ketika Erdogan sedang berada di Kota Marmaris untuk liburan.
7. Pukul 01.00, Presiden Reccep Tayyip Erdogan berhasil dihubungi oleh CNN Turki melalui sambungan aplikasi FaceTime. Dimana, Erdoganmenghimbau kepada rakyat Turki untuk berkumpul di alun-alun dan bandara untuk melawan kudeta.
8. Pukul 01.30, helikopter menembaki gedung Badan intelijen Turki.
9. Pukul 02.00, ribuan rakyat Turki turun ke jalan dan memprotes penggulingan Erdogan. Beberapa polisi yang loyal pada Erdogan berusaha menangkap tentara.
10. Pukul 02.30, penyiar TRT membacakan maklumat 'Angkatan Bersenjata Turki'. Militer mengumumkan adanya jam malam di Ankara maupun Istambul. Tentara mengklaim terpaksa melakukan kudeta, karena Presiden Erdogan sudah menyalahi konstitusi yang demokratis dan sekuler.
11. Pukul 03.15 tank terlihat menembak di dekat Gedung Parlemen Turki.
12. Pukul 03.45, PM Yildirim menuding gerakan tentara ini adalah aksi teroris.
13. Pukul 04.12, dilaporkan 17 polisi tewas ditembak di dekat Gedung Pasukan Khusus Turki di Ibu Kota Ankara. Dalam waktu bersamaan, petinggi pasukan khusus menyatakan tentara yang melakukan kudeta hanyalah minoritas, tidak akan berhasil menggulingkan pemerintah.
14. Pukul 04.40 waktu setempat. Situasi Turkidilaporkan sudah kondusif. Bahkan, para militer yang melakukan aksi kudeta telah ditangkap. Rakyat loyalis Presiden Raccep Tayyip Erdogan ikut menangkap para militer yang hendak mengkudeta itu.
15. Pukul 05.10, Erdogan telah tiba di Istambul dengan selamat dengan disambut oleh ribuan pendukungnya. KemudianErdoganmenuding upaya kudeta militer yang sempat menguasai Ibu Kota Ankara dan Istambul merupakan dalang dari pendukung ulama Fethullah Gülen. Sosok itu adalah rival politik Erdogan yang kini mengasingkan diri di Amerika Serikat. Dan menurut Erdogan bahwa Kudeta ini adalah upaya Gerakan Gülen yang sudah direncanakan. Para pelakunya adalah tentara yang melabrak hirarki komando.

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN ERDOGAN

A. Implikasi di Internal Turki

Kudeta yang terjadi di Turki pada tahun 2016 lalu, mempunyai dampak dan pengaruh yang cukup signifikan dalam dinamika politik Turki dan masih akan terus berlanjut sampai saat ini. Sebagaimana telah disinggung, pasca kudeta, pemerintah Turki langsung mengeluarkan kebijakan yang represif terhadap sejumlah pihak yang terlibat, terkhusus terhadap peran militer dan kekuasaan kehakiman yang selama ini dikuasai oleh kelompok Gulenisme.

1. Melemahnya peran militer

Sejak pembentukan negara Turki modern di tahun 1923, Angkatan Bersenjata Turki (TSK) telah melakukan kudeta tiga kali—pada tahun 1960, 1971, dan 1980—dan intervensi melalui memorandum militer pada tahun 1997. Secara historis, militer menganggap organisasinya sebagai penjaga dari Turki yang didirikan di bawah Mustafa Kemal Atatürk atau dikenal sebagai Bapak Sekularisme Turki. Sehingga Militer Turki dinobatkan sebagai pelindung negara yang berpijak pada prinsip sekularisme yang diadopsi dari Barat.

Kudeta militer yang terjadi di Turki pada 15 Juli 2016 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa pasukan militer untuk menjatuhkan pemerintahan Erdogan. Dimana pada saat itu para anggota militer menempati lokasi yang strategis di seluruh Istanbul dan Ankara, mereka meluncurkan tank ke jalanan kota dan juga Bandara Internasional Istanbul, pesawat terbang di atas kepala dan kendaraan militer dikelilingi tentara, bahkan dua jembatan utama Istanbul, Bosphorus dan Fatih Sultan Mahmet diblokir tentara. Militer telah mengambil alih pemerintahan dari negara untuk mengembalikan tatanan konstitusional, hak asasi manusia, dan kebebasan. Pernyataan itu mengarah pada perlindungan demokrasi Turki. Beberapa yang menjadi kesalahan kudeta yang terjadi di Turki pada 15 Juli 2016 lalu adalah bahwa sebagian kecil kelompok militer yang tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Keberhasilan pemerintah menggagalkan kudeta militer merupakan kemenangan buat kaum mayoritas Muslim. Kegagalan tersebut juga membuka jalan buat garis kebijakan Erdogan yang cendrung memperkuat gelombang Islamisasi di pemerintahan.

Alasan Erdogan menuduh Gülen sebagai dalang kudeta adalah adanya unsur politik yang dilakukan oleh pengkudeta yang merupakan kelompok Gülenisme, diantaranya adalah para pejabat tinggi di birokrasi sipil, kejaksaan dan aparat keamanan yang bekerja dalam jaringan rahasia mereka. Dan para pengikut Gülen di birokrasi sipil, kejaksaan, kepolisisan dan militer lebih loyal kepada perintah Gülen ketimbang institusi dimana mereka bekerja, dimana tujuan mereka adalah ingin disejajarkan dengan kedudukan Erdogan di bawah pimpinan Fethullah Gülen. Pasca kudeta militer Turki pada 15 Juli, Erdogan mengeluarkan kebijakan bahwa segala yang berhubungan dengan Gülen dilarang. Erdogan juga menetapkan bahwa Hizmet merupakan organisasi terlarang dan menggolongkan gerakan ini sebagai gerakan terorisme. Dan Impilkasi dari kebijakan ekstrim yg dikeluarkan oleh Erdogan, selain berdampak terhadap kelompok Gülen yang telah dilarang, Erdogan juga Memperketat penjagaan semua yang terkait dengan kelompok yang pro-Gülen, memperketat pengawasan termasuk Hizmet dan PASIAD yang merupakan lembaga di bawah kendali Gülen, bahkan menjebloskan para militer yang terkait dengan rencana kudeta ke penjara, dan polisi, jaksa, serta hakim telah dipecat. Kini media-media yang berafiliasi dengan Hizmet telah ditutup, sebuah bank disita, semua yang terkait dengan Gülen dipecat dan kehilangan pekerjaan mereka. Pasca kudeta, Erdogan juga menutup lebih dari 2.000 lembaga yang memiliki hubungan dengan FETO. Penangkapan massal dilakukan setelah upaya kudeta dengan 2.839 tentara ditahan oleh pemerintah.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata Turki mengatakan: "Angkatan Bersenjata Turki telah mengambil alih pemerintahan negara untuk mengembalikan ketertiban, hak asasi manusia dan kebebasan, rule of law dan keamanan umum yang telah rusak. Semua perjanjian internasional masih berlaku. Kami berharap bila hubungan baik dengan semua negara akan terus berlanjut." Mereka menyatakan bahwa mereka "melakukan ini untuk menjaga demokrasi dan ketertiban. Serta memastikan rule of law tetap menjadi prioritas". Salah satu jenderal di Angkatan Bersenjata Turki menyatakan TSK tidak mendukung upaya kudeta dan pelaku mewakili fraksi kecil. Pada 21.02 UTC, Reuters melaporkan bila tentara Turki berada dalam gedung Stasiun Radio dan Televisi Turki (TRT) di Ankara. Setelah militer menguasai gedung tersebut, militer membacakan pernyataan yang berbunyi "prinsip

demokrasi dan sekulerisme di Turki telah terkikis oleh pemerintahan saat ini" dan Turki sekarang dipimpin oleh "Dewan Perdamaian" yang akan "menjamin keselamatan warga."

Pihak militer menyatakan bila konstitusi baru akan dipersiapkan "sesegera mungkin." Ledakan di markas TRT dan baku tembak telah terjadi di Ankara. Tank telah menembakkan senjatanya di dekat Gedung Parlemen Turki. Sebuah laporan menyatakan bahwa Parlemen Turki telah dibom. Korban luka-luka dari demonstran telah dilaporkan di Jembatan Bosporus setelah baku tembak di jembatan. Sebuah helikopter milik pihak militer yang melakukan kudeta telah ditembak jatuh oleh jet tempur F-16 milik militer Turki yang masih loyal terhadap pemerintah. Terdapat laporan lain yang menyatakan bahwa sepasukan jet tempur telah dikerahkan di Ankara untuk "menetralkan" helikopter yang digunakan oleh pendukung kudeta. Kantor kepresidenan mengeluarkan pernyataan yang mengklaim jika pasukan yang setia kepada Fethullah Gülen dan Gerakan Hizmet adalah tokoh di balik upaya kudeta. Namun, organisasi cabang dari Gerakan Hizmet merilis pernyataan yang mengecam kudeta dan menyatakan bahwa tuduhan Erdogan 'sangat tidak bertanggung jawab'.

Kudeta gagal ini sendiri menyebabkan jatuh korban tewas sebanyak 161 orang. Kebanyakan adalah polisi yang berhadapan dengan tentara yang memberontak. Sebanyak 1.140 orang lainnya terluka. CNN menyebutkan setidaknya 2.839 perwira militer ditangkap. Kantor berita Anatolian menyatakan 200 pejabat pengadilan Turki juga dijebloskan ke penjara, termasuk 140 anggota Mahkamah Agung dan 48 anggota Council of State, satu dari tiga pengadilan tinggi di Turki. Sebanyak 2.745 hakim pun dinonaktifkan. Salah satu pemimpin militer Turki, Jenderal Adem Huduti juga ikut ditangkap. Begitu juga anggota Mahkamah Konstitusi Alparslan Altan. Otoritas militer Turki juga menutup jalur penerbangan di Pangkalan Udara Incirlik. Amerika Serikat memakai pangkalan ini untuk menjalankan operasi udara melawan ISIS di Suriah dan Irak. Alhasil, operasi serangan udara itu pun dihentikan sementara.

Tak lama setelah kudeta gagal ini, Erdogan kemudian melakukan keadaan darurat di seluruh Turki, dan kemudian disusul dengan menutup lebih dari 2.000 lembaga terkait Gülen di seluruh negeri. Sebanyak 35 lembaga kesehatan dan organisasi serta 1.043 lembaga pendidikan swasta, organisasi, asrama, dan hostel ditutup karena memiliki hubungan dengan Feto. Terdapat 1.229 yayasan dan asosiasi, 19 serikat, federasi dan konfederasi dan 15 sekolah dasar juga ditutup, kemudian pemecatan 15.200 orang pegawai departemen pendidikan, 9.000 orang petugas polisi, departemen kehakiman dan pegawai negeri lainnya. 7.500 orang militer dan orang-orang yang terlibat kudeta kemudian ditahan karena terlibat dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO) pimpinan Fethullah Gülen.

Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan oleh Erdogan dan gagalnya upaya kudeta yang telah dilakukan oleh angkatan bersenjata militer Turki memberikan dampak besar terhadap peran militer Turki. Yaitu, seperti melemahnya nilai-nilai sekularisme yang sebelumnya sangat dilindungi oleh Militer Turki. Terbatasnya peran militer di pemerintahan dimana sebelumnya terdapat banyaknya pendukung Gülen yang ditangkap juga berakibat terhadap melemahnya pengaruh Gülen di dalam militer. Dan kini Erdogan berkuasa penuh atas pemerintahan ditambah lagi adanya perubahan sistem pemerintahan Turki dari yang sebelumnya parlementer menjadi presidensial. Selain itu, perubahan pola di dalam militer dan kehakiman Turki berimplikasi terhadap situasi keamanan dan penegakan hukum Turki. Dan tentunya keadaan ini hanya akan memancing usaha-usaha kudeta yang lebih sistematis dan rapi dari kekuatan militer.

2. Berkurangnya Kekuasaan Kehakiman

Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mengatakan 113.600 orang telah ditangkap dan 47.155 dikembalikan ke penjara sehubungan dengan dugaan keterkaitan mereka dengan gerakan Gulen sejak upaya kudeta Juli 2016. Di antara orang yang dikembalikan ke penjara ada 10.732 perwira polisi, 7.643 tentara, 168 jenderal, 2.575 hakim dan pengacara, 26.177 warga sipil dan 208 administratur lokal, kata Soylu dalam satu wawancara dengan stasiun televisi setempat. Menurut Kementerian Dalam Negeri Turki sebanyak 23.861 tersangka perkara itu dibebaskan dan 863 lainnya masih buron. Fethullah Gulen, tokoh agama yang tinggal di Amerika Serikat, dituduh Pemerintah Turki mendalangi upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016. Pemerintah Turki mengumumkan keadaan darurat dan melancarkan operasi besar-besaran terhadap pendukung Gulen setelah upaya kudeta yang gagal tersebut.

Kepolisian Turki menggeledah tiga gedung pengadilan di kota Istanbul. Penggeledahan ini dilakukan setelah surat perintah penahanan dikeluarkan untuk 173 staf pengadilan, yang masih bagian dari penyelidikan percobaan kudeta pada 2016. Dilaporkan kantor berita Turki, Dogan, seperti dilansir Reuters, penggeledahan dilakukan di Pengadilan Istanbul yang ada di distrik Caglayan dan dua pengadilan lainnya di sisi Eropa kota Istanbul. Kepolisian mendatangi dan menggeledah kantor sejumlah staf yang terancam ditahan. Polisi membawa beberapa staf yang ditahan dari Caglayan untuk diinterogasi. Banyaknya pihak di tubuh kehakiman Turki karena dianggap memiliki hubungan dengan Gulen, tentu akan memberikan implikasi terhadap penegakan hukum di Turki. Independensi hakim akan terlihat subyektif karena peran pemerintah eksekutif terlalu tinggi. Poros yudikatif yang seharusnya bebas dari interpensi eksekutif, akan hilang ketika pemerintahan Erdogan mengatur kekuasaan kehakiman. Hakim yang bekerja harus merupakan hakim yang berlatar belakang pendukung Erdogan, sehingga pemerintah Eksekutif dapat dengan mudah mengintervensi proses hukum di pengadilan.

Erdogan mungkin melakukan kekeliruan langkah saat situasi menjadi sangat kompleks dan mengancam demokrasi Turki. Namun yang tidak dapat diabaikan bahwa kekuasaannya berdiri di atas legitimasi pemilu dan suara rakyat. Yang jelas, sebagaimana Barat dan medianya tidak mendukung langkah pembersihan unsur kudeta di Turki, seperti itu pula mereka tidak akan pernah membela saat Erdogan jatuh dikudeta, lalu partainya melawan dan dicap organisasi teroris di kemudian hari. Erdogan nampaknya banyak belajar dari pengalaman pahit Mesir dan presiden Mursi. Sikap lemah terhadap lawan politik hanya akan berujung kejatuhan dan terbunuhnya ribuan pendukungnya serta cap organisasi teroris bagi partainya yang telah susah payah memenangkan pemilu secara demokratis, sebagaimana Barat syaratkan jika ingin didukung.

Kebijakan Erdogan yang sewenang-wenang ini didukung para warganya yang menilai bahwa pelaku kudeta telah melakukan hal yang salah terhadap pemerintahan yang sah. Erdogan, meskipun belakang ini bertindak semakin otoriter, terpilih menjadi presiden lewat pemilu 2015 lalu. Ini merupakan kemenangannya yang ketiga kali sejak berkuasa di Turki 2003 lalu. AFP menyebutkan bahwa kebijakan Erdogan yang melakukan pembersihan massal Gülenis merupakan salah satu perubahan signifikan di Turki sejak negara berpenduduk 79 juta jiwa itu didirikan Mustafa Kemal pada 1923 setelah Dinasti Ottoman hancur. Dalam operasi pembersihan, merangsek tiga pengadilan di Istanbul dan menangkap 136 staf dari ketiga institusi tersebut. Mereka dituding ikut berkontibusi dalam kudeta gagal 15 Juli 2016 lalu.

Terjadinya goncangan politik di lingkungan eksekutif dan legislatif setelah banyak pejabat pemerintah di tangkap karena memiliki hubungan dengan Gülen, perubahan politik

ini memunculkan suatu kubu yang kuat bagi politik Erdogan di Turki.Selain dampak politik, Turki mengalami goncangan di bidang militer dan kekuasaan kehakiman, dimana banyak tentara dan hakim ditangkap kerena diyakini berafiliasi terhadap jaringan Gülen. Melemahnya kanal politik demokrasi akan mengalihkan proses dan konflik politik pada politik kekerasan yang mungkin sulit dihentikan.

B. Implikasi di Eksternal atau Hubungan Internasional Turki Pasca Kudeta

Penulis memilih hubungan antara Turki dan Amerika Serikat, dikarenakan, Turkidan Amerika memiliki poros politik dan militer yang sama di NATO. Sesama anggota NATO, seharusnya Turki dan Amerika memiliki hubungan yang baik dan mampu menyelesaikan permasalahan negara anggotanya. Walaupun antara Turki dan Amerika Serikat sama-sama bergabung di NATO, namun peristiwa kudeta 2016 kemarin memberikan implikasi terhadap hubungan kedua negara. Hubungan kedua negara tersebut berjalan tidak baik, karena ketidak berpihakan Amerika dalam menyelesaikan kasus kudeta pada 2016 lalu padahal seharusnya Amerika yang merupakan sesama anggota NATO dengan Turki memberikan dukungan kepada Turki seperti apa yang telah tercatat dalam tujuan NATO, yaitu menjamin keamanan setiap negara anggotanya. Pemerintah memprotes reaksi lemah, tidak efektif dan terlambat negara-negara Barat dan NATO dalam menyikapi kudeta militer 15 Juli 2016 lalu, bahkan secara transparan ataupun kiasan pemerintah menyinggung keterlibatan sebagian negara Barat khususnya Amerika Serikat dalam kudeta itu. Dan tuduhan ini tidak lepas dari sosok Fethullah Gülen yang menjadikan kedua negara tersebut semakin memanas dan menilai tuduhan tersebut berbahaya bagi hubungan bilateral.

Hubungan antara Turki dan Rusia berubah pasca-Kudeta 2016. Renggangnya hubungan Turki dan Amerika memberikan implikasi terhadap hubungan Turki dan Rusia. Perubahan drastis hubungan Turki-Rusia disebut telah membuat barat terkejut. Moskow dan Ankara diyakini mengirim “pesan multidimensi” ke Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menunjukkan Rusia dan Turki dapat membentuk aliansi ekonomi dan politik alternatif dan tetap menjadi pemain berpengaruh di papan catur Suriah. Situasi di lapangan di Suriah telah berubah drastis sekarang setelah Moskow dan Ankara telah kembali melakukan kerjasama politik, militer dan ekonomi.

Penulis memilih Turki-Indonesia karena banyak lembaga pendidikan Turki (Gülenisme) di Indonesia. Kedutaan Turki merilis nama-nama sekolah tersebut sebagai berikut:

Ada 9 lembaga pendidikan Gülen di Indonesia, yaitu:

a. Pribadi Bilingual Boarding School, Depok;

b. Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung;

c. Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School,Tangerang Selatan;

d. Semesta Bilingual Boarding School,Semarang;

e. Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Yogyakarta;

f. Sragen Bilingual Boarding School, Sragen;

g. Fatih Boy's School, Aceh;

h. Fatih Girl's School, Aceh;

i. Banua Bilingual Boarding School,Kalimantan Selatan.

Selain itu, Erdogan juga mengeluarkan kebijakan untuk menutup seluruh lembaga yang berhubungan dengan Gülen.Turki meminta (bahkan mendesak) Indonesia untuk menutup lembaga yang berafiliasi dengan Gülen atau FETO (Fethullah Terrorist Organisation). Namun Indonesia, melalui Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, menolak menutup lembaga pendidikan yang terkait dengan Gülen, karena ke-sembilan sekolah tersebut bahkan telah lama memutus kemitraannya dengan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD), yayasan nirlaba Turki yang memiliki perhatian terhadap pendidikan di Indonesia dan turut dikelola oleh jaringan Hizmet binaan Gülen. Sehingga mengakibatkan hubungan Turki dan Indonesia sedikit mengalami ketegangan.

KESIMPULAN

Presiden Erdogan memiliki peranan untuk membuat sebuah kebijakan dan memiliki tanggung jawab sebagai aktor politik yang mampu melindungi negara serta publik agar tetap tentram dan damai.Dalam memerankan perannya sebagai norm entrepreneur, Turki dihadapkan oleh beberapa tantangan penting dalam lokalisasi norma demokrasi di kawasan Timur Tengah. Adanya tantangan ini berpengaruh terhadap kredibilitas Turki sebagai norm entrepreneur dalam lokalisasi norma demokrasi di kawasan, namun seiring waktu, Turki berupaya untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut sehingga pemerintah Turki muncul sebagai aktor yang memang kredibel dalam menjalankan agenda penyebaran demokrasi di Timur Tengah. Tantangan yang dihadapi oleh Turki dalam menjalankan perannya sebagai norm entrepreneur dapat dibagi menjadi dua, yakni tantangan domestik yang muncul dari dalam serta tantangan legacy yang muncul dari riwayat Turki sebagai pelanggar hak asasi manusia dalam beragam episode sejarah.[40]

Munculnya kebijakan luar negeri Turki dalam demokratisasi di Timur Tengah dimulai dari adanya inisiatif Turki untuk melakukan pendekatan ke kawasan Timur Tengah. Menurut Nader Habibi dan Joshua Walker (2011), inisiatif Turki untuk mendekat ke Timur Tengah memang banyak tercatat pada masa-masa pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis, karena pemerintah pastinya akan memperhatikan aspirasi publik untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.[41]Dalam tantangan domestik, Turki dihadapkan pada sebuah permasalahan penting yakni masalah pertentangan antara pemerintah Turki dengan kalangan Gülen.Pada kasus pertama, yakni pertentangan antara pemerintah Turki dengan kalangan Gülen, pemerintah Turki dihadapkan pada adanya kecenderungan bahwa institusi Gülen yang merupakan sebuah lembaga non-pemerintah mulai muncul secara dominan melalui pengikut-pengikut Gülen yang menempati posisi penting di berbagai institusi-institusi pemerintahan, seperti misalnya institusi peradilan dan kepolisian. Eksistensi pengikut Gülen dalam institusi peradilan dan kepolisian ini kemudian memberikan tantangan terhadap pemerintahan Turki yang saat ini dikuasai oleh AKP(Balci, Turkey‟s Gülen Movement: Between Social Movement and Politics, 2013) . Dari perspektif pemerintahan Turki yang saat ini dikuasai AKP, kehadiran Gülen menjadi sebuah

[40] Hadza Min Fadhli Robby, 2014, *Peran Turki Sebagai Norm Entrepreneur Dalam Upaya Lokalisasi Norma Demokrasi di Timur Tengah*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada,hlm. 42.

[41]Habibi, N., & Walker, J. W. (2011, April). *What's Driving Turkey's Reengagement with the Arab World?* Middle East Brief, Crown Center for Middle East Studies(49). Hlm. 6.

ancaman tersendiri bagi eksistensi pemerintahan AKP yang menganggap bahwa hadirnya personil-personil di institusi pemerintahan yang berafiliasi dengan Gülen seolah sebuah upaya untuk melakukan pengawasan dan delegitimasi terhadap AKP. Sedangkan, dari perspektif sebaliknya, institusi Gülen melihat bahwa pemerintahan Turki dibawah AKP merupakan pemerintahan yang memiliki tendensi otoritarian, koruptif dan tidak demokratis, sehingga perlu diawasi, bahkan perlu diganti untuk kelangsungan proses demokratisasi di Turki.[42]

Terjadi kudeta militer di Turki pada Juli 2016, sehingga Erdogan mengeluarkan kebijakan bahwa kelompok Gülenisme atau Hizmet merupakan kelompok terlarang, dan semua yang pro-Gülen dan berafiliasi dengan Gülen mendapat penjagaan yang ketat. Selain itu kebijakan yang dilakukan oleh Erdogan memberikan implikasi cukup serius pada stabilitas hubungan politik luar negeri Turki dengan negara-negara lain pascadikeluarkannya kebijakan Erdogan yang melarang seluruh aktivitas organisasi Gülen, salah satunya dengan Amerika. Hal ini bisa dilihat dari bergesernya posisi Turki dalam konflik Suriah, dimana pada awalnya sebelum kudeta 2016, Turki bersama Amerika mendukung kelompok oposisi di Suriah. Namun ketidak berpihakan Amerika dan NATO dalam penyelesaian kasus kudeta gagal yang didalangi oleh Gülen, menyebabkan Turki berbalik arah ke Rusia dan lebih banyak berdiskusi mengenai penyelesaian konflik di Suriah yang notabennya merupakan musuh Amerika dan NATO. Dan keadaan ini membuat keretakan terhadap hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Selain dengan Amerika, perubahan arah politik luar negeri Turki juga terjadi dengan negara penguasa blok Timur, Rusia. Sebelum kudeta militer di Turki pada 2016 yang lalu, hubungan Turki dan Rusia cenderung berada dalam fase yang buruk. Bahkan dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-20, hubungan antara Kesultanan Utsmaniyah dan Kekaisaran Rusia buruk karena kedua negara tersebut beberapa kali berperang. Namun, pada tahun 1920-an, Rusia yang saat itu dikuasai oelh kaumBolshevik membantu Gerakan Nasional Turki selama PerangKemerdekaan Turki, sehingga pemerintah di Moskwa dan Ankara memiliki hubungan yang hangat. Pada tahun 1932, Republik Turki untuk pertama kalinya meminjam uang dari luar negeri, dan sumbernya berasal dari Uni Soviet.Namun hubungan keduanya berubah pasca-Kudeta 2016. Renggangnya hubungan Turki dan Amerika memberikan implikasi terhadap hubungan Turki dan Rusia. Perubahan drastis hubungan Turki-Rusia disebut telah membuat barat terkejut. Moskow dan Ankara diyakini mengirim "pesan multidimensi" ke Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menunjukkan Rusia dan Turki dapat membentuk aliansi ekonomi dan politik alternatif dan tetap menjadi pemain berpengaruh di papan catur Suriah.[43]

Telah terjadi perubahan 180 derajat hubungan Rusia-Turki telah menangkap masyarakat internasional dan negara-negara Barat lengah. Selain pembaharuan pembicaraan di Suriah, Rusia dan Turki memiliki sejumlah proyek energi dan hubungan perdagangan yang juga segera mencair setelah terganggu dengan penembakan Su-24 Rusia oleh F-16 Turki pada 24 November 2015 di perbatasan Suriah-Turki.[44]Tetapi bagaimanapun Rusia dan Turki baru-baru ini menunjukkan kepada Barat bahwa mereka mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan tetap menjadi pemain berpengaruh di Timur Tengah.Disamping

---

[42] Hadza Min Fadhli Robby,*op.cit.*, hlm. 43.

[43]*Hubungan Turki Rusia Berubah 180 Derajat, Barat Terkejut*, http://www.jejaktspsk.com, akses pada tsnggsl 1 Februari 2017, pukul 11.51.

[44]*Ibid.*

itu pula, kebijakan Erdogan kepada Gülen berdampak pada penutupan atau melarang seluruh aktivitas organisasi yang terkait dengan Gülen.Hal ini tentu berdampak pada beberapa negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga Gülen, salah satunya adalah Indonesia.Dimana Turki meminta untuk menutup sekolah-sekolah yang terkait dengan jaringan Gülen di Indonesia. Kemudian hubungan keduanya tambah renggang, ketika beberapa mahasiswa Indonesia yang belajar di Turki ditangkap oleh pihak keamanan turki "karena dianggap memiliki jaringan dengan Gülen".[45]

[45] *Satu Lagi Mahasiswa Indonesia ditahan Otoritas Turki*, http://nasional.republika.co.id, akses pada tanggal 30 Januari 2017, pada pukul 16.00.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adian Husaini, 2005, *Wajah Peradaban Barat*, Gema Insani Press, Jakarta.

Mohtar Mas'oed, 1989, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Reorisasi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

_____, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan metodologi*, LP3ES, Jakarta.

_____, 1991, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologisnya*, LP3ES, Jakarta.

Sidik Jatmika, 2014, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*, Maharsa Publishing House, Yogyakarta.

Syarif Taghian, 2012, *Etdogan Muadin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Jurnal

Atika Puspita Marzaman, 2013, *Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Intervensi NATO ke Libya*, Tesis, Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, hlm. 1.

Fawaz Gergez dalam Lorenzo Vidino, 2013, *The West and The Muslim Brotherhood After The Arab Spring*, Al Mesbar Studies & Research Center and Foreign Policy Institute, Hlm.6.

Habibi, N., & Walker, J. W. (2011, April). *What's Driving Turkey's Reengagement with the Arab World?* Middle East Brief, Crown Center for Middle East Studies(49). Hlm. 6.

Hadza Min Fadhli Robby, 2014, *Peran Turki Sebagai Norm Entrepreneur Dalam Upaya Lokalisasi Norma Demokrasi di Timur Tengah*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada,hlm. 42.

Herry Wahyudi, 2016, *Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kudeta Mesir 2013*, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, hlm. 50.

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, 2009, *Sentimen Islamophobia dalam Isu Keanggotaan Turki di Uni Eropa*, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, hlm. 82.

Novian Uticha Sally, 2014, *PASIAD sebagai Soft Power Turki di Indonesia*, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, hlm.25.

S. Calleya, M. Wohlfeld (ed), 2012,*Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean*, Malta: University of Malta, hlm. 370-371.

S. Shroff, 2009, *Muslim Movements Nurturing A Cosmopolitan Muslim Identity: The Ismaili and Gülen Movement*, Georgetown University, Washington D.C., hlm. 71.

Internet

Analisis Mengapa Kudeta Mesir Berhasil dan Turki Gagal, http://m.republika.co.id, akses pada tanggal 29 Januari 2017.

Duta Besar Turki untuk Indonesia, Hubungan di Bidang Kebudayaan dan Pendidikan (Daring), 2009, http://mfa.gov.tr, akses pada 22 Januari 2017.

Hizmet Organisasi Terlarang di Turki yang Membuat WNI dipenjara, http://news.detik.com, akses pada tanggal 31 Agustus 2016.

Hubungan Turki Rusia Berubah 180 Derajat, Barat Terkejut, http://www.jejaktspsk.com, akses pada tsnggsl 1 Februari 2017.

Indonesia dan Turki Memperkuat Kerja Sama Pertahana, https://lancercell.com, akses pada tanggal 18 Januari 2017.

Indonesia dan Turki Sepakat untuk Memperkuat Kemitraan Strategis, http://www.kemlu.go.id, akses pada tanggal 18 Januari 2017.

Indonesia-Turki Sepakat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi dan Counter Terrorisme, http://www.kemlu.go.id, akses pada tanggal 18 Januari 2017.

Kayhan Delibas, 2009, *Conceptualizing Islamic Movements: The Case of Turkey. International Political Science Review*, (Vol. 30, No. 1), Sage Publications, Ltd., hlm. 90 diakses melalui http://www.jstor.org pada tanggal 22 Januari 2017.

Kronologi Kudeta Berdarah Militer Turki, akses dari http://m.tempo.co, pada tanggal 23 Januari 2017.

Kudeta Militer Turki Bentuk Empire Strikes Back, http://nasional.kompas.com, akses pada tanggal 23 Januari 2017.

Melumpuhkan Dominasi Militer Turki, http://internasional.kompas.com, akses pada 22 Januari 2017.

Menilik Sejarah Panjang Konflik Rusia-Turki, akses dari http://m.cnnindonesia.com, pada tanggal 22 Januari 2017.

Satu Lagi Mahasiswa Indonesia ditahan Otoritas Turki, http://nasional.republika.co.id, akses pada tanggal 30 Januari 2017.

Sejarah Turki dari Keruntuhan Ottoman Hingga Kegemilangan Erdogan, http://duniatimteng.com, akses pada tanggal 22 Januari 2017.

Shadi Hamid, 2011, *The Rise of The Islamist Will Change Politics, and Vice Versa*, Foreign Affairs, (Vol. 90, No. 3), Sage Publications, Ltd., hlm. 40, diakses melalui http://www.jstor.org pada tanggal 22 Januari 2017.

Tak Selalu Mulus Bagaimana Sejarah Hubungan Rusia Turki Sebenarnya, akses dari http://indonesia.rbth.com, pada tanggal 25 Januari 2017.

UU No. 37.1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, http://pustakahpi.kemlu.go.id, akses pada tanggal 26 Januari 2017.